

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor.

Bogor, 6 Maret 2023


Rudy Mashudi, S.T., M.P.
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 197707062006041018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA BOGOR.....	1
1. Kedudukan	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi.....	2
B. ISU STRATEGIS	4
C. DASAR HUKUM	4
D. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. PERENCANAAN KINERJA	6
A. <i>VISI DAN MISI</i>	6
B. <i>TUJUAN DAN SASARAN</i>	6
C. <i>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</i>	9
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. PENGUKURAN KINERJA	18
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KREATIVITAS, INOVASI DAN PERAN LITBANG DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	21
SASARAN 2: MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA, SINERGITAS DAN KEBERLANJUTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	26
SASARAN 3: MENINGKATNYA TATAKELOLA BAPPEDA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN	AKUNTABEL....31
BAB IV PENUTUP	37
IKHTISAR EKSEKUTIF	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2022	8
Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	11
Tabel 3 Program dan Indikator Program Bappeda Kota Bogor Tahun 2022	13
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2022	17
Tabel 5 Predikat Nilai Capaian Kinerja	18
Tabel 6 Target dan Realisasi Capaian Tujuan Bappeda Tahun 2022	19
Tabel 7 Target dan Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....	20
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Kinerja RPJMD	20
Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	21
Tabel 11 Pemenang Lomba BIA Perguruan Tinggi/Lembaga/Pelaku Usaha	23
Tabel 12 Pemenang Lomba BIA Masyarakat	23
Tabel 13 Pemenang Lomba BIA ASN	23
Tabel 14 Pemenang Lomba BIA Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat	23
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.....	26
Tabel 16 Rincian Evaluasi SAKIP Kota Bogor Tahun 2022	27
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2019-2024	28
Tabel 18 Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	31
Tabel 19 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Bogor Tahun 2022.....	32
Tabel 20 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2022	33
Tabel 21 Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
Gambar II Misi dan Tujuan	7
Gambar III Tujuan dan Sasaran	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan, Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor secara normatif di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah “Lokomotif Pembangunan Daerah” serta menjadi lini terdepan dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, profesional dan bertanggungjawab sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan orientasi yang diinginkan dan bersifat partisipatif terhadap perkembangan kompleksitas permasalahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah harus menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan asas rencana pembangunan daerah tersebut, maka penyusunan rencana pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor selalu menyerap informasi dari hasil evaluasi kinerja perencanaan sebelumnya.

1. Kedudukan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor bahwa

Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bappeda Kota Bogor sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Bogor merupakan unsur penunjang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota, adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

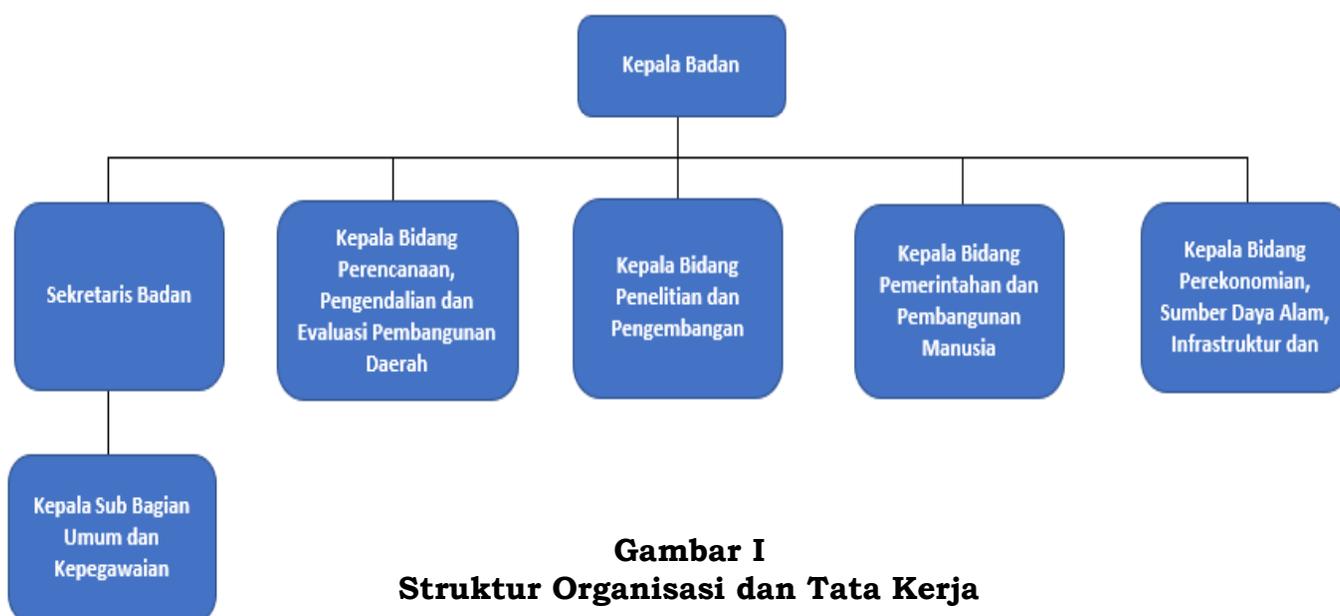
3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Substansi Keuangan;
 - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan :

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Pemerintahan Umum;
 - b. Kelompok Substansi Pemerintahan Wilayah;
 - c. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
- 5) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Kelompok Substansi Infrastruktur;
 - c. Kelompok Substansi Kewilayahan.
- 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan;
 - b. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA



Gambar I
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sumber: Peraturan Walikota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

B. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya:

- 1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum dapat mengakomodir sepenuhnya usulan dari masyarakat;
- 2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada konektivitas secara spesial serta berkelanjutan, permasalahannya:
 - a. Pembangunan daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor;
 - b. Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan.
- 3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil (outcome).

C. Dasar Hukum

LKIP Bappeda disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang; Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
10. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

D. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2022.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- a. Gambaran umum Bappeda Kota Bogor;
- b. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bogor;
- c. Isu Strategis;
- d. Dasar Hukum, serta;
- e. Sistematika Penulisan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Perjanjian Kinerja.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- a. Pengukuran Kinerja;
- b. Evaluasi, dan Capaian Kinerja;
- c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk:

1. Menghubungkan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional;
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja;
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI

Untuk mendorong terwujudnya Visi Kota Bogor “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga” Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kota Bogor mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun Misi Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kota yang sehat;
- 2) Mewujudkan Kota yang cerdas;
- 3) Mewujudkan Kota yang sejahtera.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke

depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

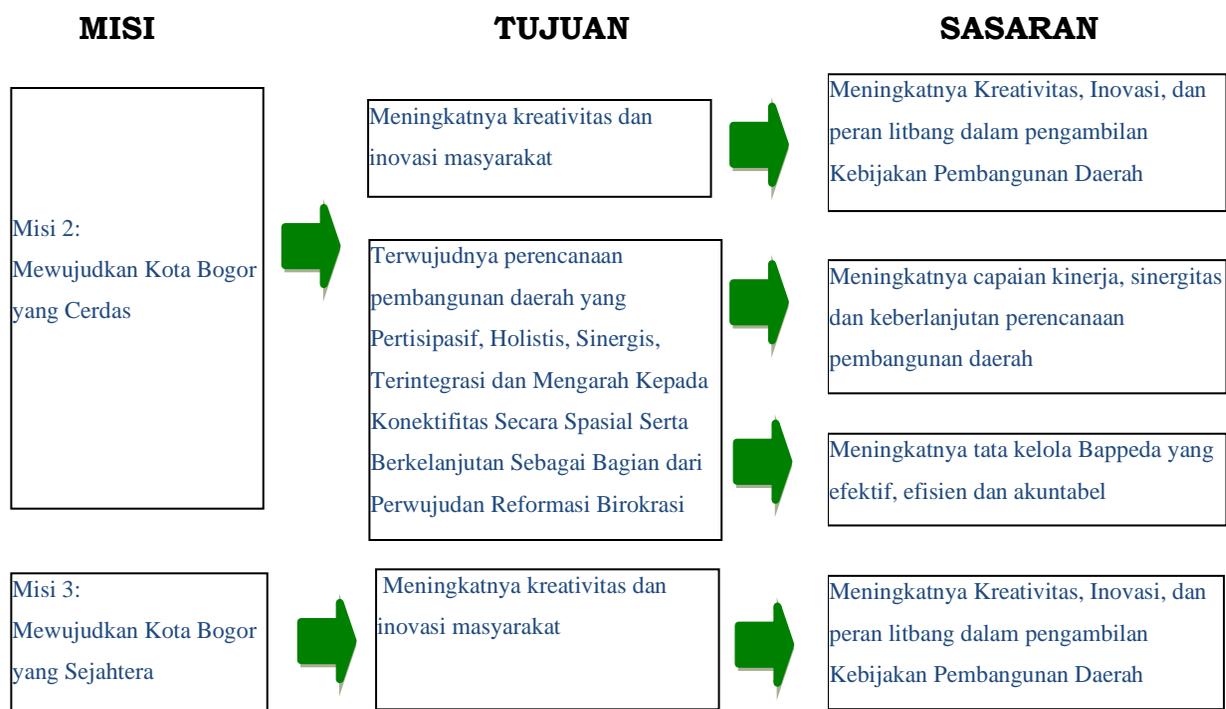
Demi mendukung tercapainya misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024, dalam hal ini Bappeda Kota Bogor telah menetapkan Tujuan, sebagai berikut :



Gambar II
Misi dan Tujuan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang ingin dicapai, untuk itu Bappeda Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Gambar III
Tujuan dan Sasaran

Selain menetapkan Tujuan dan Sasaran, perlu di tetapkan juga target Indikator Tujuan, dan Indikator Sasaran, yang ingin di capai setiap tahunnya, berikut ini target indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda pada tahun 2022 yang telah di tetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda tahun 2019-2024.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2022
Tujuan 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50
Tujuan 2 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24
	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01
Sasaran 2.1 : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	69

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2022
Sasaran 2.2 : Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bogor secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Strategi yang ditetapkan adalah Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang berbasis bukti dan data secara kualitas dan kuantitas yang sinergis dan berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024. **Kebijakan** yang ditetapkan adalah Terimplementasinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demi mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Bappeda Kota Bogor telah merumuskan hubungan antara strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi Daerah	Meningkatkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah dan Penguatan peran kelitbang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali Kreatifitas dan inovasi masyarakat dan ASN dalam pembangunan daerah. 2. Penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi. 3. Membuat Komitmen agar rekomendasi hasil litbang ditindaklanjuti jadi kebijakan.
		Indeks Kualitas Kebijakan		
		Persentase rekomendasi hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan		
Tujuan 2 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektivitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi		Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota		
		Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah		
	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Mengembangkan sistem capaian kinerja perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berbasis kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Peta Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dan tahunan. 2. Penguatan data dan Informasi. 3. Menjamin ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat daerah. 4. Penguatan Sistem Informasi E database dan E Planning. 5. Diversifikasi skema pembiayaan pembangunan daerah. 6. Penguatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis kinerja. 2. Pemberian reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah
	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel</p>	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan evaluasi secara berkala atas penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Bappeda. 2. Meningkatkan koordinasi aparatur perencanaan pembangunan daerah. 3. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi SDM perencana dan fungsional melalui diklat dengan lembaga diklat dalam dan luar negeri terkait. 4. Menginventarisir Kebutuhan sarana dan prasarana operasional lingkup Bappeda.

D. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya di tetaokan program dan kegiatan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Program dan Indikator Program Bappeda Kota Bogor Tahun 2022

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.028.362.353
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.092.971.400

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
	Pembangunan Daerah	penilaian SAKIP Tingkat Kota		
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR		
		Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah		
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.651.420.500
		Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia		

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
		Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD		
		Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
		Persentase keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA		
		Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		Persentase ketercapaian target Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Total Anggaran
		Infrastruktur dan Kewilayahan		
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.248.624.200
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
		Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
		Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV. Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran dan Program Sekretaris serta Kepala Bidang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon IV yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian Program dan Kegiatan Kasubag/Kasubid oleh Sekretaris serta Kabid di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja juga

digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50%
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	69%
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Tabel 5
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Capaian (%)	Kategori	Realisasi	Keterangan
85 - 100	Sangat Baik	> Target	Tercapai dan Melebihi Target
70 - <85	Baik	= Target	Tercapai
55 - <70	Cukup	< Target	Tidak Mencapai Target
<55	Kurang	> Target	

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran pada Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Target dan Realisasi Capaian Tujuan Bappeda Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24	23,70
	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01	73,17

Tabel 7
Target dan Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	100	2.248.624.200	2.178.845.400
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50	80	160		
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24	23,70	98,75	2.744.391.900	2.536.691.219
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	69	77,42*	112,20		
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01	73,17	91,45	1.602.836.235 3	15.496.735.05 5

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	100	57,80 (Inovatif)	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50	80	160	60	20
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24	23,70	98,75	23,75	-0,05*
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	69	77,42*	112,20	74,91	2,51*
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01	73,17	91,45	-	73,17

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Kinerja RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Capaian sd Akhir Renstra	Persentase Capaian sd Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	100	Inovatif	100
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50	80	160	50	160
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24	23,70	98,75	26	91,15
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	69	77,42*	112,20	73	106,05
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01	73,17	91,45	82	89,23

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang

objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan memilih sesuatu untuk di golongkan dan di kelompokkan Kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan di tafsir maknanya.

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi dan Analisis untuk menjamin terlaksananya, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target dan rencana yang telah di tetapkan, selain itu agar terdapat umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang selanjutnya di tindaklanjuti dengan perbaikan atau dihentikan. Pelaksanaan evaluasi kinerja masing-masing sasaran Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	100	611-620 (Inovatif)	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50	80	160	60	20

Sumber: Bidang Litbang

Cara perhitungan:

1. Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (dasar: Penetapan oleh Kemendagri)
2. Jumlah hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh Hasil Litbang x 100

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di dukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2022 alokasi anggaran yang telah di anggarkan untuk mendukung tercapainya setiap indikator sasaran sebesar Rp. 2.248.624.200, dengan realisasi sebesar Rp. 2.178.845.400 atau sebesar (96,90%), dan sisa anggaran yang tidak terserap merupakan Rp. 69.778.800 merupakan efisiensi anggaran.

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6302.A Tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, Kota Bogor mendapat peringkat ke-28 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 56,48 masuk dalam kategori inovatif adapun jumlah inovasi yang diinput sebanyak 25 inovasi yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pada tahun 2021 capaian kategori Inovasi Daerah Kota Bogor adalah Inovatif, meskipun mendapat kategori yang sama dengan tahun 2022 tetapi terdapat perbedaan pada skor indeksinya dimana pada tahun 2021 mendapatkan skor 57,80 dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,32, dengan skor 56,48. Keberhasilan dari pencapaian target ini karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan apresiasi terhadap inovasi yang muncul dari masyarakat dalam bentuk pemberian penghargaan melalui pelaksanaan lomba Bogor Innovation Award (BIA), dan dukungan dari Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap inovasi yang muncul serta adopsi inovasi untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaan lomba BIA tahun 2022 terdapat 93 inovator/peserta yang melakukan registrasi, setelah di laksanakan verifikasi administrasi seluruh peserta dinyatakan lolos dan selanjutnya dinilai oleh Tim juri lomba BIA. Perlombaan ini dibagi menjadi 5 kategori dimana masing-masing kategori ditetapkan 6 pemenang, untuk lebih jelasnya pemenang dari masing-masing kategori dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 11
Pemenang Lomba BIA Perguruan Tinggi/Lembaga/Pelaku Usaha

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Produksi Kopi Rendah Asam	1	Pelaku Usaha
PS (Padi Scanner) : Aplikasi Deteksi Kesehatan Padi	2	Universitas Pakuan
Praktik Berbasis Industri Pada Siswa Pemasaran Untuk Meningkatkan Hard Skill Dan Soft Skill	3	SMK Wikrama (Lembaga)
Produksi Minuman Inovasi Berbasis Bunga Telang Sebagai Imunomodulator	4	Pelaku Usaha
Granola Bar: solusi jitu olah limbah menjadi snack kaya kalsium dan aman dikonsumsi oleh anak berkebutuhan khusus	5	Universitas Pakuan
Ekstraktor Multifungsi	6	Universitas Pakuan

Tabel 12
Pemenang Lomba BIA Masyarakat

Nama Inovasi	Juara
Sabun Halimun Belukar Organics	1
Komunitas (Nurturer Squad) Peduli Pendidikan Dhuafa Kota Bogor	2
Buku Jurnal Kehamilan Muslim & Edukasi Online Bunda HaPpy	3
Bilang Aja! Telang Powder	4
Kaldu Seafood/Chitosan Alternatif Sehat Pengganti Penguat Rasa dan Aplikasi Zero West Cooking pada Bisnis Camilan si Cemplon	5
Lampu Lampion Kulit Ari Biji Alpukat	6

Tabel 13
Pemenang Lomba BIA ASN

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Sosial Integrasi Data	1	Dinas Sosial Kota Bogor
SITARSIMO	2	UPTD Puskesmas Bogor Selatan
SIPATUHAR (Si Patuh Minum ARV)	3	Puskesmas Bogor Timur
LAYANAN DRIVE THRU DISDUKCAPIL	4	Disdukcapil Kota Bogor
Peri Gigi Beraksi	5	Puskesmas Kedung Badak
SI RUSSA (RUMAH SEMBELIH SAPI) BUBULAK	6	UPTD RPH Terpadu Dinas Ketahanan dan Pertanian

Tabel 14
Pemenang Lomba BIA Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Salebusim; Salep Buah Simpur	1	SMPN 6 Kota Bogor
Cymphic Pengusir Nyamuk dan Aroma Terapi	2	SMPN 10 Kota Bogor
Pekuka: pemanfaatan Buah Semangka	3	SMPN 6 Kota Bogor
Pemanfaatan limbah daun untuk dijadikan energi terbarukan briket arang daun	4	SMP IT Bina Bangsa Sejahtera Bogor
Moringa Puding & Rempeyek Morlei (pengolahan pangan daun kelor)	5	SMPN 10 Kota Bogor
Pemanfaatan limbah batang pohon pisang menjadi lembaran komposit	6	SMPN 20 Kota Bogor

Berdasarkan hasil assessment Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) inovasi dari pelaksanaan lomba BIA tahun 2022 terdapat 26 inovasi yang layak

untuk di fasilitasi sertifikasi HKI. Pada saat pelaksanaan fasilitasi HKI hanya 18 Inovator yang mengajukan sertifikasi, namun hanya 5 inovasi yang mendapatkan sertifikasi HKI yang di terbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Peran penelitian dan pengembangan secara yuridis telah diperkuat dalam beberapa produk perundang-undang seperti Undang-undang nomor 18 tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri.

Namun pada kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sehubungan dengan hal tersebut Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor terus ber upaya untuk mengedapnkan hasil-hasil penelitian dan akajian dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkualitas.

Pada Tahun 2022, terdapat 5 kajian yang telah dihasilkan oleh Bappeda Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kajian Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kota Bogor dari aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
2. Kajian Implementasi SDGs dari aspek geospasial;
3. Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bogor Tahun 2017-2022;
4. Kajian Penyusunan Rancang Lansekap Kampung Tematik Kampung Lauk dan Kampung Bebek;
5. Kajian Road Map Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2022-2025.

Adapun 4 (empat) hasil kajian yang di hasilkan pada tahun 2022 dijadikan bahan penyusunan kebijakan, sehingga realisasi persentase rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 80%, penyusunan kebijakan yang menggunakan hasil kajian sebagai berikut:

1. Kajian Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kota Bogor dari aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya ditindaklanjuti sebagai bahan rencana pemekaran otonomi daerah Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur;
2. Kajian Evaluasi Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bogor Tahun 2017-2022 ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bogor Tahun 2023-2028;
3. Kajian Penyusunan Rancang Lanskap Kampung Tematik Kampung Lauk dan Kampung Bebek ditindaklanjuti sebagai sebagai bahan persiapan penghargaan Satya Lencana Kepala Daerah;
4. Kajian Road Map Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2022-2025 ditindaklanjuti sebagai bahan perubahan nomenklatur perangkat daerah, dimana daerah harus membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Sasaran 2: Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24	23,70	98,75	23,75	-0,25*
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	69%	77,42*	112,20	74,91	2,51*

Sumber: Bidang PPEPD

Cara perhitungan:

1. Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB
2. Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran x 100

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2022 alokasi anggaran yang telah di anggarkan untuk mendukung tercapainya setiap indikator sasaran sebesar Rp. 2.654.162.100, dengan realisasi sebesar Rp. 2.536.691.219 atau sebesar (95,57%), dan sisa anggaran yang tidak terserap merupakan Rp. 117.470.881 merupakan efisiensi anggaran.

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat, hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan melakukan perbaikan dalam pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, dalam rangka mendukung hal tersebut perlu adanya reformasi perencanaan dan penganggaran.

Pendekatan utama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini adalah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran harus memperlihatkan kinerja pada periode sebelumnya dan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, oleh karena itu sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan serta evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk di perhatikan dalam rangka pencapaian kinerja perencanaan dan pembangunan sesuai dengan target yang telah di tentukan dalam RPJMD.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bogor Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 75,20 atau predikat BB, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Pemerintah Daerah dan Sebagian besar unit kerja, di tandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil rincian evaluasi sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Evaluasi SAKIP Kota Bogor Tahun 2022

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3	Pelaporan Kinerja	15	11,12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,08
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi tersebut tidak diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian. Pada table di atas dapat kita lihat untuk komponen perencanaan kinerja Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 23,70. Setiap tahun proses perbaikan secara terus menerus dilakukan oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan hasil laporan evaluasi internal Bappeda yang secara rutin dilaksanakan, dimana dokumen perencanaan yang disusun di periode selanjutnya telah memperhatikan perumusan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja outcome sesuai dengan yang diharapkan, penjabaran kinerja disetiap levelnya, memenuhi kriteria specific, measurable, achieveable, relevant dan time bound (smart) serta memperhatikan keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran strategis sehingga anggaran yang digunakan efektif untuk pencapaian kinerja dalam Renstra PD ataupun RPJMD.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan, efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan berdasarkan Indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra PD dan RPJMD, selain itu evaluasi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana, pelaksanaan rencana maupun setelah kebijakan kebijakan/program/kegiatan selesai dilaksanakan.

Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2022 sebesar 77,42% capaian kinerja ini melebihi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019-2023 sebesar 69%, realisasi ini di dapat dari rata-rata realisasi capaian kinerja per urusan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,93	74,13	100,27
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	70,00	70,02	100,03
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	0,49	0,57	116,33
4	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	59,30	68,68	115,82
5	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	7,20	5,42	75,28
6	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	2,12	2,02	95,28
7	Persentase Reduksi Sampah	%	6,80	7,80	114,71
8	Indeks Kualitas Air	Angka	36,17	51,39	142,08
9	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,63	98,36	123,52
10	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,21	4,24	100,71
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,62	10,58	99,62
12	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,63	13,43	98,53
13	Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SD	Angka	Tidak ada Ujian	Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2022	-

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi
14	Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP	Angka	Tidak ada Ujian	Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2022	-
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	62,09	NA	-
16	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	100,00
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	71,50	72,33	101,16
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71,50	79,16	110,71
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	BB	-
20	Level Kematangan Smart City	Level	Integrative	Integrative	100,00
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,32	10,78	95,23
22	Angka Kemiskinan	%	6,90	7,10	102,90
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	75-77	85,2*	110,65
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,65	105,21
25	PDRB Per Kapita	Juta Rp	45,10	49,76	110,33
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	11,534	12,058	104,54
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	23,00	18,70	81,30
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	60	60	100,00
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	60	60	100,00
30	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%	86,00	88,23	102,59
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	44	42,15	95,80

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,51% dari tahun 2021 dengan realisasi capaian sebesar 74,91%. Realisasi capaian kinerja ini masih hasil sementara dikarenakan hingga laporan ini

disusun, masih terdapat beberapa data yang belum disampaikan oleh Perangkat Daerah. Permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan evaluasi selama tahun 2022 adalah :

1. Laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak tepat waktu sehingga menghambat pelaporan dan evaluasi;
2. Minimnya bimbingan teknis yang diselenggarakan dari pusat maupun Provinsi terkait teknis dan implementasi pemantauan, pengendalian dan evaluasi sehingga terkadang tidak bisa menjawab permasalahan teknis yang muncul di lapangan ketika Pemerintah Daerah menerapkan ke Perangkat Daerah; dan
3. Terdapat Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan capaian kinerja yang tidak tepat isi dan tidak tepat format sehingga menghambat pelaporan evaluasi;

Rencana Tindak lanjut demi tercapainya target capaian kinerja yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, Bappeda terus melakukan proses perbaikan di mulai dari mengarahkan Perangkat Daerah pada saat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk melaksanakan perencanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target-target yang telah di tetapkan dalam RPJMD tahu 2019-2024. Selain pada proses perencanaan Bappeda juga melaksanakan binbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian dan provinsi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga dalam prosesnya bisa mengakomodir penyelesaian terhadap hambatan tercapainya Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran 3: Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Tabel 18
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan
Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	80,01	73,17	91,45	-	-

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah

Cara perhitungan:

1. Nilai hasil evaluasi Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kota Bogor

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2022 alokasi anggaran yang telah di anggarkan untuk mendukung tercapainya indikator sasaran sebesar Rp.16.028.362.353, dengan realisasi sebesar Rp.15.496.735.055 atau sebesar (96,68%).

Reformasi administrasi dan birokrasi dalam upaya perbaikan kondisi daerah terus dilakukan seiring dengan berbagai tautan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah, baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi, sosial dan budaya karena pergaulan global dan era persaingan bebas. Dalam Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah agar dapat mengurangi resiko yang perlu dihadapi, maka beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang perlu di perhatikan para pemangku kepentingan di daerah adalah :

1. Reformasi birokrasi dimulai dengan reformasi individu, dan membutuhkan dukungan pemicu perubahan yang mendorong orang lain untuk reformasi diri;
2. Aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi Aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Pemerintah tidak memikul reformasi sendiri, banyak mitra dapat ikut serta meningkatkan kinerja pemerintah; dan
5. Reformasi birokrasi perlu dukungan secara politis, agar mendapatkan momentum dan resonansi yang besar.

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan

daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik meliputi transparansi, responsif, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bappeda Kota Bogor tahun 2022, telah ditetapkan nilai indeks reformasi birokrasi sebesar **73,17** dengan kategori **“BB”**, nilai tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Daerah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19
Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Bogor Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2022
A.	Komponen Pengungkit	36,30	35,53
	I. Pemenuhan	14,6	14,37
	II. Reform	21,70	21,16
B.	Komponen Hasil	50,00	27,83
	1. Akuntabilitas Kinerja	10,00	8,05
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,53
	3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,00	1,00
	4. Kinerja Organisasi	20,00	10,48
C.	Penilaian Tim	13,07	9,59
Indeks Reformasi Birokrasi		100	73,17

Berdasar rincian penilaian di atas pada Komponen hasil terdapat 2 komponen yang nilainya masih rendah yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan nilai 1,00, dan (2) Kinerja Organisasi dengan nilai 10,48. Berdasarkan catatan hasil evaluasi, kecilnya nilai tersebut disebabkan karena :

1. Pelaksanaan public campaign belum dilakukan secara berkala serta Pelaksanaan publik campaign belum dilakukan secara berkala serta gratifikasi;
2. Belum dilaksanakan pembangunan serta monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas;
3. Pola pelaksanaan change management khususnya pengelolaan Pola pelaksanaan change management khususnya pengelolaan mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
4. mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi;
5. Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dasar Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dasar

untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya.

Merujuk pada hasil catatan evaluasi tersebut, Bappeda selalu berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bappeda Kota Bogor sehingga terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah, mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2022 Bappeda Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 20.931.148.653.- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.212.271.674.- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 96,57%, realisasi tersebut masuk kedalam kategori baik. Rincian Anggaran per sasaran pada Bappeda Kota Bogor Tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Program	Tahun 2022		
			Pagu	Realisasi	Persen Realisasi
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	2.248.624.200	2.178.845.400	96,90
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Pengendalian dan valuasi Pembangunan daerah	1.002.741.600	977.617.500	97,49
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.651.420.500	1.559.073.719	94,41

No	Sasaran	Program	Tahun 2022		
			Pagu	Realisasi	Persen Realisasi
3	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.028.362.353	15.496.735.055	96,68
JUMLAH			20.931.148.653	20.212.271.674	96,57

Dari Tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran pada setiap sasaran di atas 90% dimana realisasi tersebut termasuk dalam kategori baik. Pada pelaksanaannya juga terdapat efisiensi anggaran yang rata-rata merupakan hasil efisiensi hasil nego pada pengadaan barang dan jasa. Sasaran dan program di dukung oleh kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 21
Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2022

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PERENCANAAN	18.682.524.453,00	18.033.426.274,00	96,53
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.831.300,00	246.578.800,00	99,49
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.964.300,00	28.920.200,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.287.000,00	117.258.300,00	99,13
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.580.000,00	100.400.300,00	99,82
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.530.769.873,00	11.225.172.460,00	97,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.530.769.873,00	11.225.172.460,00	97,35
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.472.250,00	1.307.316.793,00	96,73
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.992.800,00	16.935.900,00	99,67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.189.800,00	82.563.850,00	99,25
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.912.650,00	11.832.000,00	99,32
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.419.100,00	20.003.500,00	85,42
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.417.800,00	44.114.800,00	99,32
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.987.000,00	12.000.000,00	75,06
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.225.000,00	13.140.000,00	32,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.115.328.100,00	1.106.726.743,00	99,23
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.737.290,00	613.582.000,00	96,06
	Pengadaan Mebel	54.263.490,00	46.620.000,00	85,91

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	584.473.800,00	566.962.000,00	97,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.416.988.320,00	1.279.333.913,00	90,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.498.400,00	123.303.685,00	67,56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.234.489.920,00	1.156.030.228,00	93,64
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.563.320,00	824.751.089,00	97,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.136.000,00	326.144.170,00	95,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.840.000,00	142.937.752,00	99,37
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	356.587.320,00	355.669.167,00	99,74
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	778.511.800,00	761.210.000,00	97,78
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	37.775.000,00	32.975.000,00	87,29
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	212.830.000,00	205.650.000,00	96,63
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	527.906.800,00	522.585.000,00	98,99
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	157.229.800,00	150.607.500,00	95,79
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	157.229.800,00	150.607.500,00	95,79
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67.000.000,00	65.800.000,00	98,21
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	67.000.000,00	65.800.000,00	98,21
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	537.774.800,00	535.644.500,00	99,60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	537.774.800,00	535.644.500,00	99,60
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	511.284.100,00	468.419.019,00	91,62
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	511.284.100,00	468.419.019,00	91,62
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	602.361.600,00	555.010.200,00	92,14
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	602.361.600,00	555.010.200,00	92,14

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.248.624.200,00	2.178.845.400,00	96,90
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	669.668.400,00	653.247.000,00	97,55
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	669.668.400,00	653.247.000,00	97,55
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	145.290.000,00	130.938.700,00	90,12
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	145.290.000,00	130.938.700,00	90,12
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	694.847.400,00	673.498.600,00	96,93
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	694.847.400,00	673.498.600,00	96,93
16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	738.818.400,00	721.161.100,00	97,61
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	124.927.600,00	124.202.600,00	99,42
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	583.666.000,00	569.476.500,00	97,57
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	30.224.800,00	27.482.000,00	90,93
	JUMLAH	20.931.148.653,00	20.212.271.674,00	96,57

Sumber: Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2022. LKIP menggambarkan Kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Di Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang mencapai/melebihi target dan 2 (dua) indikator sasaran yang tidak mencapai target. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2022 telah disusun program dan kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 20.931.148.653.- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 20.212.271.674.- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 96,57%.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik Bappeda Kota Bogor terus menerus mengupayakan perbaikan kinerja. Upaya Perbaikan yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim untuk melaksanakan pendampingan, coaching clinic, asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mulai dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) mulai dari tahapan perumusan permasalahan dan isu strategis, analisis data dan informasi, serta penyelarasan tujuan, sasaran, program yang tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat kota (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (RENSTRA/RENJA).
2. Membentuk Tim untuk melaksanakan pendampingan, coaching clinic, asistensi perumusan penjenjangan kinerja (Cascading kinerja) Perangkat Daerah berdasarkan hasil penyelarasan tujuan, sasaran, program yang tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat kota (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (RENSTRA/RENJA).

3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil penjenjangan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah secara berkala.
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian atau Provinsi Jawa Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan PD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra PD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan kritikal point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan Bappeda yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Organisasi di tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator yang ditetapkan yaitu:

SASARAN:

1. Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Tatakelola Bappeda yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

INDIKATOR:

1. Kategori Inovasi Daerah;
2. Indeks Kualitas Kebijakan;
3. Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan;

4. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota;
5. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target;
6. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah;

Dari total 6 (enam) indikator Sasaran tersebut 1 (satu) indikator sasaran tidak di ukur pada tahun 2022 karena pengukurannya dilakukan selama 2 (dua) tahun sekali, 2 (dua) Indikator sasaran yang tidak mencapai target dan 3 (tiga) indikator sasaran yang mencapai target. Total anggaran yang di Kelola Bappeda Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar Rp. 20.931.148.653.- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.212.271.674.- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 96,57%, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 187.249.681,-.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Bappeda, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Setelah itu baru ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai, program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing target kinerja sasaran. LKIP digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Organisasi.